

TABEL 5.2
TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA

MISI I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	1. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Presentase Peningkatan Disiplin ASN	Peningkatan Tata Kelola Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai yang Baik Bersih dan Akuntabel dengan melihat Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Presentase Peningkatan Disiplin ASN berdasarkan Nilai SAKIP dari Nilai Presentase Sakip BB menuju Nilai Presentase SAKIP A	
MISI IV : MEWUJUDKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN MERATA				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Layanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penataan Permukiman	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan kualitas layanan rumah layak huni	Penyediaan bantuan stimulan perumahan layak huni	
		Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Penanganan kawasan dan perumahan permukiman kumuh	
		Meningkatkan layanan bantuan perumahan bagi korban bencana alam dan sosial	Peningkatan kesiapan layanan perumahan bagi korban bencana alam dan sosial	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana utilitas umum	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana utilitas umum	
	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Meningkatkan kualitas layanan perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Meningkatkan kualitas layanan perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Peningkatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum
			Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan fasilitasi masalah pertanahan.	Peningkatan kemudahan proses perizinan dan fasilitasi masalah pertanahan